

STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI DALAM EKONOMI MONETER SYARIAH

Ana Sofiya¹, Andik Setiawan², Dedy Nur Fathurrohimi³
Universitas Trunojoyo Madura

220721100052@student.trunojoyo.ac.id, 220721100166@student.trunojoyo.ac.id,
220721100074@student.trunojoyo.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi untuk mengendalikan inflasi dalam ekonomi moneter syariah di Indonesia. Ekonomi Islam sebagai sistem perekonomian mempunyai cara dan strategi tersendiri dalam menekan inflasi yang jauh berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Melalui analisis terhadap Strategi pengendalian inflasi dalam ekonomi moneter syariah menunjukkan efektivitas dalam menciptakan stabilitas harga dan distribusi pendapatan yang lebih merata. mencapai norma keadilan sosial ekonomi perlu ada upaya untuk menjaga stabilitas harga, melalui strategi perbaikan moral, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, serta penghapusan riba. Dan bagaimana Indonesia dapat menghadapi tantangan inflasi dan tetap setia pada nilai-nilai syariah yang mendasari sistem keuangan Islam. Pendekatan ekonomi syariah menawarkan kerangka kerja alternatif yang mencakup prinsip-prinsip yang berlandaskan pada ajaran Islam.

Kata Kunci : *Strategi; Inflasi; Ekonomi; Moneter; Islam*

Abstract

This research aims to find out strategies for controlling inflation in the sharia monetary economy in Indonesia Islamic economics as an economic system has its own ways and strategies in suppressing inflation which are very different from other economic systems. . Through analysis of inflation control strategies in the sharia moneter economy, it shows its effectiveness in creating price stability and income distribution that more fully achieves norms of socio-economic justice. There needs to be an effort to maintain price stability, a strategy to improve morals, an even distribution of income and wealth, and the elimination of tuba. And how Indonesia can face the challenge of inflation and remain true to its values. sharia which underlies the Islamic financial system The sharia economic approach offers an alternative framework that includes principles based on Islamic teachings

Keywords: *Inflation; Strategy; Islamic; Monetary; Economics.*

PENDAHULUAN

Inflasi adalah masalah ekonomi yang terus-menerus mempengaruhi negara-negara maju dan berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti sirkulasi uang yang berlebihan, yang menyebabkan peningkatan daya beli dan ketersediaan barang yang terbatas, menyebabkan kenaikan harga. Selain itu, inflasi dapat berasal dari meningkatnya biaya produksi seperti harga bahan baku dan gaji karyawan,

mendorong produsen untuk menaikkan harga komoditas. Studi di Indonesia telah menunjukkan bahwa inflasi dipengaruhi oleh indeks harga konsumen dan tabungan, sementara faktor-faktor seperti nilai tukar, PDB, dan suku bunga tidak memiliki dampak langsung pada inflasi. Selain itu, inflasi dapat diperburuk oleh kemacetan pasokan sektoral, meningkatnya margin laba di pasar global, dan spekulasi keuangan. Memahami penyebab beragam ini sangat penting untuk mengelola inflasi secara efektif dan dampaknya terhadap perekonomian.

Dalam bidang ekonomi Islam, pemanfaatan suku bunga untuk tujuan mengelola inflasi sangat dilarang. Bunga dianggap identik dengan riba karena beberapa faktor seperti penentuan laba awal, kenaikan nilai pokok, pengenaan risiko dan kerugian pada peminjam, tindakan ketidakadilan, dan pengejaran laba yang terus-menerus. Ekonomi Islam menempatkan penekanannya pada distribusi kekayaan yang adil dan penahanan kemakmuran. Kebijakan moneter merupakan upaya untuk mengatur atau mengawasi kondisi ekonomi dalam suatu negara. Upaya ini diwujudkan dalam mengejar peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui langkah-langkah seperti stabilisasi harga dan pencegahan kecenderungan inflasi (Yofita Sari, 2024).

Instrumen keuangan syariah menggunakan mudharabah untuk mencapai stabilitas harga yang berkelanjutan (Srisusalawati, P., & Eprianti, N, 2017). Akibatnya, kebijakan moneter dilaksanakan dengan menggunakan instrumen moneter Syariah untuk mengatur tingkat inflasi. Islam menempatkan penekanan besar pada konsep keadilan dan distribusi pendapatan yang merata. Dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter diarahkan untuk mendorong stabilitas ekonomi sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pembagian keuntungan. Kerangka ekonomi Islam didasarkan pada ideologi yang berbeda, yang mengarah ke jalur pembangunan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan Kapitalisme (Junery & Muhammad Fadhil, 2012). Dampak inflasi pada kegiatan ekonomi sangat signifikan, dengan inflasi menjadi titik fokus perhatian para ekonom, pemerintah, dan penduduk pada umumnya. Berbagai strategi telah dirancang untuk mengelola inflasi secara efektif. Oleh karena itu, para sarjana terlibat dalam mengeksplorasi inflasi dan strategi yang digunakan untuk mengatasinya dalam konteks Islam, karena artikel ini berusaha untuk menyelidiki topik “Perspektif Strategi Pengendalian Inflasi Ekonomi Moneter Islam.”

KAJIAN PUSTAKA

Secara umum, inflasi menimbulkan tantangan dalam ranah ekonomi sebagai lonjakan harga agregat yang komprehensif (Samsul, et al, 2019). Dalam konteks ekonomi Islam, konsep inflasi tidak didefinisikan secara eksplisit, karena uang dilambangkan dengan dinar dan dirham, seperti yang diuraikan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Masalah inflasi saat ini ditandai dengan kecenderungan konsumsi yang berlebihan, seperti yang disorot oleh Dwihapsari, et al (2021). Mengontrol inflasi merupakan tanggung jawab utama Bank Sentral di setiap negara. Kewajiban ini, sebagaimana ditunjukkan di Indonesia, diuraikan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Pasal 7 UU ini menetapkan bahwa merupakan kewajiban Bank Indonesia untuk mencapai dan menjunjung tinggi stabilitas mata uang rupiah (Siregar, S, 2014).

Kebijakan moneter Islam mewakili kerangka kerja yang menonjol yang mengharuskan tidak memiliki komponen riba dan bunga bank. Dalam konteks Islam, segala bentuk riba, yang mencakup bunga bank, secara eksplisit dilarang. Tata kelola moneter dalam Islam beroperasi pada konsep dasar pembagian keuntungan (Latifah,

2015). Ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang mengkaji berbagai aspek perilaku manusia terkait pemenuhan kebutuhan hidup dalam rangka mencapai falah, ketenangan, dan kemakmuran baik di dunia sekarang maupun akhirat (PP Islam, 2011).

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, seperti yang digambarkan dalam presentasi ekspositori temuan dari penelitian perpustakaan pada sumber tekstual seperti buku dan jurnal. Untuk mendapatkan data berkualitas tinggi, para sarjana menggunakan metodologi tertentu, dengan penelitian menjadi yang terpenting di antara mereka. Penelitian melibatkan pengumpulan materi melalui penelusuran buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya, umumnya dikenal sebagai penelitian perpustakaan, segi penelitian dalam domain ilmu perpustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Moneter

Wacana tentang Kebijakan Moneter melibatkan tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengelola variabel keuangan seperti kredit, jumlah uang beredar, dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Di Indonesia, Undang-Undang Perbankan telah mengalami beberapa revisi terkait kebijakan ini dengan tujuan untuk menegakkan stabilitas mata uang Rupiah, serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa dan nilai tukar mata uang. Regulasi sirkulasi uang dirancang untuk berdampak pada inflasi, stabilitas ekonomi, tingkat harga, neraca pembayaran, dan generasi peluang kerja, dengan dampak yang meluas ke sektor perbankan dan seterusnya. Khususnya, suku bunga memainkan peran penting dalam mempengaruhi permintaan barang dan jasa, serta kegiatan investasi, sehingga berpotensi meningkatkan atau mengurangi kinerja ekonomi secara keseluruhan. Stabilitas ekonomi menandakan keadaan ekonomi yang terkendali, dapat diprediksi, dan berkelanjutan. Kebijakan moneter menjadi penting ketika fluktuasi harga yang signifikan terjadi karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan, karena penyimpangan dapat memiliki dampak luas pada kegiatan ekonomi. Selain itu, variasi dalam alokasi uang, barang, dan jasa dapat mempengaruhi kecenderungan investor untuk terlibat dalam sektor riil (Warjiyo, 2017).

Kebijakan Moneter Islam

Kebijakan moneter Syariah telah terus-menerus didasarkan pada keadaan nyata dari sektor asli. Singkatnya, perubahan kondisi sektor ekonomi produktif merupakan bagian integral dari kebijakan moneter. Tingkat ekuilibrium sektor moneter ditentukan oleh sektor riil, meskipun perubahan di sektor riil tidak selalu dikaitkan dengan sektor moneter. Kebijakan moneter Islam didasarkan pada alokasi sumber daya untuk mengoptimalkan produktivitas. Dalam kebijakan moneter Islam, tujuan permintaan uang adalah untuk memenuhi persyaratan transaksi produktif dan investasi. Permintaan mata uang yang didorong oleh spekulasi tidak akan berkontribusi untuk meningkatkan sektor riil (Warjiyo, 2017). Spekulasi hanya menghasilkan penyalahgunaan dana dan inefisiensi dalam permintaan uang. Islam menegaskan bahwa kemandirian permintaan mata uang dapat dicapai melalui pemeliharaan nilai tukar yang terus-menerus oleh pemerintah, serta pencegahan dan larangan transaksi mata uang dan penyebaran mata uang palsu. Bunga digunakan sebagai instrumen kebijakan moneter dalam sistem moneter untuk mengatur sirkulasi uang di masyarakat, konsep yang berbeda dari yang lain (Aji & Mukri, 2020).

Peran Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Syariah

Dengan menerapkan doktrin Islam tentang melarang penggabungan suku bunga dalam pasar keuangan, kebijakan moneter Syariah berusaha untuk menegakkan aliran aset ekonomi yang berkelanjutan dengan pengawasan badan pengawas. Kebijakan moneter Islam bertanggung jawab untuk mengawasi mata uang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga mendorong ekonomi yang stabil dan berkelanjutan (Rahmawaty, 2013).

Instrumen Kebijakan Moneter Islam

1. *Reserve Ratio* merupakan Persentase simpanan atau cadangan yang dimiliki nasabah yang wajib dikembalikan oleh bank sentral. Dengan meningkatkan rasio cadangan, bank sentral mampu mempertahankan tingkat uang yang stabil dalam perekonomian. Akibatnya, bank terpaksa menyimpan uang, sehingga menurunkan modal yang tersedia untuk investasi dan mengendalikan inflasi. Penggunaan instrumen ini untuk mengendalikan peredaran uang dianggap sejalan dengan keadilan Islam, pemerataan, dan larangan bunga/riba. mengelola simpanan cadangan yang wajib dimiliki oleh bank, membimbing perekonomian untuk menjaga distribusi yang adil, menahan diri dari kegiatan kepentingan ilegal, dan mendorong akuntabilitas, transparansi, dan melayani kebutuhan masyarakat. Rasio cadangan merupakan mekanisme kebijakan moneter dalam perekonomian Islam yang menjunjung tinggi norma Islam dalam mengendalikan aliran uang dan mencapai hasil perekonomian yang diinginkan.
2. *Moras Suassion* ketika perekonomian dalam keadaan depresi, kebijakan bank sentral meningkatkan permintaan kredit yang ditujukan kepada bank komersial dan pelaku moneter lainnya, sehingga mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Dampaknya adalah peningkatan jumlah pinjaman bank komersial, yang membawa uang ke dalam perekonomian. Langkah ini mempercepat aliran uang ke seluruh masyarakat dan mengurangi tekanan akibat kemerosotan ekonomi. Bujukan moral menunjukkan upaya bank sentral untuk mempengaruhi perilaku bank komersial dan mendorong kemajuan ekonomi, meskipun hal tersebut tidak dapat ditegakkan secara hukum. Alat ini berkaitan dengan ajaran moral dan etika tanggung jawab sosial dan ekonomi dalam ajaran Islam. Bahkan karena “persuasi moral” tidak dinyatakan secara eksplisit, namun prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, keseimbangan, membantu mereka yang membutuhkan, mengamalkan masyarakat, dan melayani masyarakat disertakan.
3. *Lending Ratio* dalam kajian ilmu ekonomi Islam, rasio pinjaman mengacu pada konsep Qardhul Hasan yang menyatakan bahwa pinjaman yang baik lebih penting daripada pinjaman yang macet. Qardhul Hasan adalah sebutan untuk jenis pinjaman tanpa bunga yang ditawarkan kepada mereka yang membutuhkan dalam ekonomi Islam. Sebenarnya rasio pinjaman menampilkan porsi uang yang disisihkan oleh lembaga keuangan syariah atau bank untuk memberikan pinjaman sesuai dengan pedoman Qardhul Hasan.
4. *Refinance Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan seseorang dalam membayar kembali pinjaman setelah melakukan proses refinancing. Ketika rasio refinance meningkat, hal ini menunjukkan peningkatan jumlah pembiayaan tanpa bunga. Sebaliknya, jika rasio refinancing menurun, hal ini menandakan bank umum perlu berhati-hati karena insentif pemberian pinjaman tanpa bunga lebih rendah. Prinsip rasio refinancing menggambarkan pentingnya

memperluas aksesibilitas pendanaan yang adil dan sesuai syariah untuk mendorong kesejahteraan dan kegiatan ekonomi Bersama

5. *Profit Sharing Ratio Rasio* (PSR) merupakan rasio yang digunakan untuk menentukan bagaimana keuntungan dibagi di antara para mitra dalam suatu kemitraan. Rasio ini biasanya didasarkan pada kesepakatan antar mitra, yang dapat mencakup investasi masing-masing mitra, upaya yang diberikan, atau faktor lain yang disepakati. Dalam ekonomi Islam, menetapkan rasio bagi hasil (PSR) sebelum meluncurkan sebuah perusahaan sangat penting untuk menjamin alokasi pendapatan yang adil. bahaya yang dialami oleh para peserta. Bank sentral dapat menaikkan PSR untuk meningkatkan jumlah uang beredar yang akan menarik para investor serta pemilik perusahaan untuk berpartisipasi dalam mencari modal banyak.

Peran Dan Konsekuensi Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Syariah

Sukuk Islam, sejenis alat keuangan Islam, melibatkan pembelian sukuk oleh investor yang menerima pembayaran berkala berdasarkan margin keuntungan tertentu. Mekanisme kebijakan Sukuk berfungsi sebagai pendekatan inovatif bagi pemerintah untuk mengatur peredaran uang selama periode inflasi. Dengan menerbitkan Sukuk tambahan, pemerintah dapat menghasilkan dana dari pasar sebagai respons terhadap inflasi, sehingga mengurangi jumlah uang beredar dan mengurangi tekanan inflasi (Warjiyo, 2017).

Alih-alih menerima bunga, investor menerima sebagian pendapatan yang dihasilkan dari aset atau inisiatif yang didukung oleh sukuk. Aturan syariah, seperti aturan yang melarang riba, spekulasi, dan investasi komersial, harus dipatuhi oleh sukuk syariah hal-hal yang dilarang dalam Islam (seperti perjudian dan alkohol). Sukuk sering kali diawasi oleh dewan syariah atau pakar syariah yang mengeluarkan fatwa, atau opini, tentang kepatuhan instrumen tersebut terhadap prinsip syariah, untuk memastikan kepatuhannya (Warjiyo, 2017).

Pasar global telah menyaksikan peningkatan popularitas sukuk syariah, khususnya di kalangan investor Muslim yang mencari opsi sesuai syariah. Hal-hal tersebut di atas merupakan instrumen atau alat kebijakan moneter yang ditinjau dari segi etika dan moral dapat dikaitkan dengan cita-cita prinsip syariah. Alat alat ini dikembangkan untuk mengelola lingkungan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan seimbang yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam.

Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. Akibat dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat karena secara ritel tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi, misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5% sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara ritel pendapatan mengalami penurunan sebesar 5% yang akibatnya secara relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga.

Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Dari definisi ini ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum, dan berlangsung terus menerus. Secara umum, inflasi rendah masih dapat diterima, bahkan dalam tingkat

tertentu bisa mendorong perkembangan ekonomi. Misalnya Indonesia mengalami inflasi 3%.

Dengan inflasi tersebut, berarti harga barang naik sekitar 3% juga. Keadaan tersebut mendorong produsen untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka (sesuai hukum penawaran, apabila harga barang/ jasa naik maka produsen akan menambah jumlah barang/ jasa yang ditawarkan) (Hamdan Ardiansyah, 2023). Dengan harga yang semakin tinggi, menjadikan pendapatan produsen meningkat. Selain itu peningkatan biaya produksi tidak secepat kenaikan harga. Dengan demikian, kenaikan harga produk berarti juga mendorong peningkatan laba produsen.

Di sisi lain, inflasi yang rendah menyebabkan daya beli masyarakat menurun, tetapi tidak signifikan. Mungkin sebagian penduduk tidak merasakan kenaikan harga. Akibatnya mereka tidak mengurangi belanja/ konsumsinya. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Karena dari sisi permintaan menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis, sehingga berdampak pada berkurangnya konsumsi masyarakat (Hamdan Ardiansyah, 2023).. Turunnya permintaan akan direspon oleh produsen dengan mengurangi jumlah produksi. Pada akhirnya roda perekonomian ikut terpengaruh menjadi melambat dan PDB mengalami penurunan.

Hubungan antara Inflasi dengan Tingkat Bagi Hasil Inflasi

Suatu kondisi meningkatnya harga-harga yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah permintaan yang melebihi dari jumlah barang yang ditawarkan (inflationary gap). Dengan demikian, membuat nilai uang akan menurun, karena uang yang mengejar barang terlalu banyak Menurut Keynes, inflasi terjadi karena adanya kecenderungan masyarakat ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya).

Mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap suku bunga suku bunga merupakan konsekuensi biaya Situasi ini, akan mempengaruhi perekonomian secara luas, termasuk akan bagi penerima pinjaman dan pendapatan bagi pemberi pinjaman. Demikian pula dalam produk yang menerapkan sistem tingkat bagi hasil, tingkat bagi hasil merupakan konsekuensi biaya oleh penerima pembiayaan dan pendapatan bagi penerima pembiayaan (Hamdan Ardiansyah, 2023).. Dengan demikian, suku bunga dan bagi hasil merupakan dua unsur yang saling bersaing, karena menjadi acuan bagi setiap orang yang ingin menabung maupun mengambil pinjaman.

Hubungan antara Tingkat Suku Bunga dengan Tingkat Bagi Hasil

Suku bunga tidak hanya dapat mempengaruhi laju inflasi akan tetapi suku bunga akan mempengaruhi tingkat bagi hasil pada produk-produk jasa keuangan syariah. Suku bunga yang berlaku pada produk jasa keuangan bank konvensional merupakan kompetitor oleh produk jasa keuangan bank syariah, sehingga setiap terjadi perubahan tingkat suku bunga selalu direspon oleh bank syariah dengan melakukan revaluasi tingkat bagi hasil (Hamdan Ardiansyah, 2023).. Karena itu, kedua instrument ini akan saling bersaing dalam menetapkan tarif.

Apabila pendapatan bagi hasil lebih tinggi dari pada pendapatan bunga maka, dapat mendorong masyarakat menggunakan instrument berbasis sistem bagi hasil, demikian pula sebaliknya Pendapatan bagi hasil merupakan pendapatan yang diperoleh atas kerjasama sama dalam pengelolaan suatu usaha (Hamdan Ardiansyah, 2023).. Namun,

didalam sistem bagi hasil, bukan hanya keuntungan yang akan dibagi, akan tetapi termasuk kerugian. Karena itu, pendapatan dalam sistem bagi hasil sangat tergantung pada keuntungan maupun kerugian yang diperoleh.

Hubungan antara Inflasi dengan Deposito Mudharabah

Inflasi merupakan suatu kondisi meningkatnya harga-harga barang maupun jasa, sehingga dalam situasi tersebut akan membuat kondisi perekonomian menjadi tidak stabil. Kenaikan harga-harga pada barang maupun jasa membuat masyarakat cenderung mengurangi konsumsinya maupun tabungannya, karena inflasi membuat pendapatan riil masyarakat menurun (Fauziah, 2022)..

Dengan demikian, permintaan terhadap berbagai jenis barang juga akan menurun, akibatnya pendapatan oleh perusahaan juga mengalami penurunan. Situasi tersebut, menjadi informasi negative bagi investor, sehingga investor akan menunda untuk melakukan investasi, dan mereka lebih cenderung menabung di bank, karena terdapat potensi pendapatan bunga yang tinggi dari kegiatan menabung. Pandangan ini sejalan dan ditemukan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah (Hamdan Ardiansyah, 2023)..

Hubungan antara Tingkat Suku Bunga dengan Tabungan Deposito Mudharabah

Suku bunga merupakan bagian dari instrument kebijakan moneter. Pengendalian suku bunga dapat berfungsi untuk mengatur jumlah uang beredar agar kondisi perekonomian dapat terbebas dari tekanan inflasi maupun deflasi (Fauziah, 2022). Dengan demikian, penerapan suku bunga memiliki fungsi yang cukup penting dalam perekonomian. Perubahan suku bunga sering kali menjadi acuan dalam penentuan tingkat bagi hasil, sehingga perubahan suku bunga dapat mempengaruhi jumlah tabungan deposito mudharabah keputusan dalam memilih tujuan investasi dan menabung dipengaruhi oleh besarnya tingkat pendapatan dan risiko dari setiap pilihan investasi maupun Tabungan (Hamdan Ardiansyah, 2023).

Ketika pendapatan bagi hasil dari tabungan deposito mudharabah lebih tinggi dari pendapatan bunga, maka masyarakat akan lebih cenderung memilih tabungan deposito mudharabah, demikian pula sebaliknya, apabila pendapatan bunga lebih tinggi, bila menabung di bank konvensional, maka masyarakat akan lebih tertarik menabung di bank konvensional, akibatnya jumlah tabungan deposito mudharabah akan menurun. Namun, keputusan menabung juga cenderung dipengaruhi oleh factor lainnya, (Natalia, dkk, 2014).

Hubungan antara Tingkat Bagi Hasil dengan Deposito Mudharabah.

Tingkat bagi hasil merupakan rasio bagi hasil antara pemilik dana dengan pengelola dana yang dibagikan kepada pemilik dana dan pengelola dana. Semakin tinggi rasio tingkat bagi hasil, maka akan semakin tinggi pula potensi pendapatan oleh pemilik dana. Namun, besarnya pendapatan tidak hanya ditentukan oleh tingkat bagi hasil, akan tetapi juga ditentukan oleh besarnya hasil (laba) yang dapat diperoleh pengelola dana (Fauziah, 2022).

Dengan demikian, rasio tingkat bagi hasil yang tinggi serta kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang juga tinggi, akan menjadi informasi positif oleh masyarakat,

sehingga informasi tersebut dapat membuat masyarakat lebih tertarik menabung di bank syariah dengan memanfaatkan tabungan Deposito Mudharabah. (Ali, H & Supriyanto, S, 2018).

Pengaruh Tidak langsung Inflasi terhadap Jumlah Deposito Mudharabah

Hasil penelitian Menunjukkan bahwa variabel Inflasi (X1) berpengaruh terhadap Jumlah Tabungan Deposito Mudharabah (Y2) melalui Tingkat Bagi Hasil dengan nilai koefisien sebesar $-0,235 \times 0,970 = 0,228$. Sementara, pengaruh langsung variabel Inflasi terhadap jumlah tabungan Deposito mudharabah sebesar 0,251. Dengan demikian, total pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen melalui viraibel intervening sebesar $0,228 + 0,251 = 0,479$. Berdasarkan nilai tersebut, menunjukkan bahwa nilai pengaruh tidak langsung 0,228 lebih kecil dari pengaruh langsung sebesar 0,479. Dengan demikian, secara tidak langsung variabel Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tabungan Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. (Fauziah, 2022).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal tentang strategi pengendalian inflasi dalam ekonomi moneter Islam menunjukkan bahwa pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi inflasi. Strategi seperti kebijakan moneter yang berfokus pada stabilitas harga, distribusi yang adil, dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dapat membantu mencapai tujuan pengendalian inflasi sambil memperkuat prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Namun, implementasi strategi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai ekonomi Islam, kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, dan adaptasi terhadap konteks ekonomi dan keuangan yang spesifik. Dengan demikian, strategi pengendalian inflasi dalam ekonomi moneter Islam dapat menjadi landasan yang kuat untuk membangun sistem keuangan yang stabil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2020). Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah (Upaya Islami Mengatasi Inflasi) Edisi Revisi 2020. Deepublish.
- Ali, H & Supriyanto, S. (2018). Analisis Hubungan antara Pendapatan, Dana Pihak Ketiga, dan Return On Asset dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1(1).
- Ardiansyah, H. (2023). Pengendalian Inflasi Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi Syariah*, 2(1), 35-46.
- Dwihapsari, R., Kurniaputri, M. R., & Huda, N. (2021). Analisis efektivitas kebijakan moneter dalam perspektif konvensional dan Syariah terhadap inflasi di Indonesia tahun 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 980-993.
- Fauziah, N. W. (2022). Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito Mudharabah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 435-447.
- Islam, P. P. (2011). *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Junery, M. F. (2012). Konsep Moneter Islam Solusi terhadap Penanggulangan Guncangan (Shock) Ekonomi. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 1(1), 99-116.

- Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 11(2), 124-134.
- Natalia, E., Dzulkirom, M., & Dan Mangesti, R. S. (2014). Pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012). Brawijaya University
- Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Rahmawaty, A. (2013). Uang dan Kebijakan Moneter dalam perspektif ekonomi islam. *Equilibrium*, 1(2), 181-199.
- Samsul, S., Hamid, N. M., & Nasution, H. G. (2019). Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 16-28.
- Sari, Y. (2024). Kebijakan Moneter Islam Dalam Upaya Mengendalikan Inflasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1).
- Siregar, S. (2014). Politik Ekonomi Islam Dalam Pengendalian Inflasi. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 1-23.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12-23.
- Warjiyo, P. (2017). Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia (Vol. 11).